

FAKTOR DETERMINAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DI JAWA TENGAH 2019-2023

Eka Destiani¹; Novi Dirgantari²; Amir³; Hadi Pramono⁴

Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto^{1,2,3,4}

Email : ekadestiani1312@gmail.com¹; novidirgantari@ymail.com²;
amirriset@yahoo.com³; pramono.hadi.75@gmail.com⁴

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian mengevaluasi dampak akuntabilitas daerah, belanja daerah, serta ukuran pemerintahan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah. Dalam penelitian diterapkan pendekatan kuantitatif dengan data yang diambil dari LKPD (laporan keuangan pemerintahan daerah) Provinsi Jawa Tengah selama rentang waktu 2019 hingga 2023, dengan total 35 sampel. Pengujian hipotesis dengan Structural Equation Modeling (SEM). Dari hasil analisis yang dilakukan, akuntabilitas daerah terbukti berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah, demikian pula dengan belanja daerah dan ukuran pemerintahan yang juga menunjukkan dampak negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci : Akuntabilitas; Kinerja Keuangan; Belanja; Ukuran Pemerintah Daerah

ABSTRACT

The purpose of the study was to evaluate the impact of regional accountability, regional spending, and government size on the financial performance of regional governments in Central Java Province. The study applied a quantitative approach with data taken from the LKPD (regional government financial report) of Central Java Province for the period 2019 to 2023, with a total of 35 samples. Hypothesis testing with Structural Equation Modeling (SEM). From the results of the analysis carried out, regional accountability was proven to have a negative effect on regional financial performance, as well as regional spending and government size which also showed a negative impact on the financial performance of regional governments.

Keywords : Accountability; Financial Performance; Spending; Regional Government Size

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dilandasi undang-undang nomer 22 (1999) dan undang-undang nomer 32 (2004) tentang pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengelola pemerintahan dijalankan sesuai dengan prinsip otonomi daerah, tujuan utama mempercepat pencapaian kualitas layanan publik, meningkatkan kapasitas masyarakat serta memperkuat daya saing daerah. Semua ini dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip tata kelola pemerintahan yang efektif di tingkat kabupaten dan kota. Dasmara, Basri, & Indrawati, (2020). Otonomi daerah sangat berkaitan erat dengan kinerja keuangan daerah untuk mendukung tercapainya kesejahteraan melalui

layanan publik yang optimal Purwanti & Noviyanti (2022). Akuntabilitas pemerintah daerah dapat terwujud melalui penyusunan laporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan yang baik Ulfah (2018). Sejalan dengan aturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 yang mewajibkan proses penyusunan keuangan daerah berdasarkan prinsip-prinsip standar akuntansi pemerintahan (SAP). Dengan demikian, kinerja keuangan daerah yang efektif menjadi syarat penting untuk mendukung pelaporan yang akuntabel dan transparan (Runtuwene & Gamaliel, 2019).

Kinerja keuangan pemerintah daerah tidak hanya mencerminkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran, tetapi juga menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan implementasi otonomi daerah. Kinerja ini mencakup bagaimana pemerintah daerah mampu mengelola penerimaan dan belanja secara optimal, transparan, serta akuntabel, sejalan berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan serta selaras dengan visi yang telah ditetapkan organisasi publik (Sains, 2018).

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperoleh pada tahun 2020, BPK menyampaikan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang mengindikasikan bahwa laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan. Permasalahan dalam pengelolaan keuangan khususnya terkait efisiensi pengelolaan keuangan. Rasio efisiensi menunjukkan bahwa alokasi anggaran untuk mengumpulkan pendapatan asli daerah (PAD) masih belum optimal, dengan rata-rata persentase di atas 100%, yang mengindikasikan bahwasanya pengeluaran untuk menghasilkan perolehan masih tinggi. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi dan perbaikan dalam perencanaan serta pelaksanaan anggaran untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah Halim, Savitri, & Diyanto (2016). Menurut Onibala, Rotinsulu, & Rorong (2021), pengukuran kinerja keuangan menggunakan rasio kemandirian menggambarkan sejauh mana suatu daerah mampu membiayai kegiatannya tanpa bergantung pada pihak lain. Misalnya, menurut penelitian Safitri dan kolega (2023), rata-rata rasio kemandirian di kabupaten dan kota Provinsi Jawa Tengah di tahun 2019 adalah 0,44%, namun angka ini turun menjadi 0,38% pada tahun 2020. Penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah berkontribusi signifikan keseluruhan kinerja keuangan daerah. Sejumlah penelitian menyatakan akuntabilitas daerah berperan positif dan signifikan dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah. Seperti menurut

Jeriansyah & Mappanyukki (2020) dan Vikrama (2017) menemukan bahwa akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah. Tidak semua penelitian mengungkapkan adanya hubungan positif antara akuntabilitas daerah maupun kinerja keuangan daerah. Penelitian Jitmau, Kalangi, & Lambey (2017) menyatakan akuntabilitas daerah tidak memberikan dampak berarti terhadap kinerja pemerintah daerah. Ini terjadi karena kegagalan pemerintah dalam menjalankan visi dan misi tercapainya sasaran dan tujuan yang dirumuskan dalam periode tertentu. Penelitian Binawati & Badriyah (2022) mengungkapkan bahwa akuntabilitas belum mempengaruhi kinerja pemerintah daerah, yang disebabkan melalui kurangnya pengawasan dan tindakan atas pertanggungjawaban, meskipun akuntabilitas tidak mempengaruhi kinerja keuangan daerah akuntabilitas daerah tetap menjalankan tugasnya dalam bentuk pelaporan dan pengungkapan informasi yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik.

Belanja Daerah (APBD) berperan dalam menentukan hasil kinerja keuangan pemerintahan daerah. Menurut Anugerah (2024) menjelaskan bahwa APBD berfungsi sebagai tulang punggung dalam pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah, mencerminkan komitmen terhadap pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. penelitian Olin, Herdi & Goo (2024) menambahkan bahwa APBD adalah suatu indikator pencapaian atas pembangunan tahunan, yang mencerminkan efektivitas pengelolaan anggaran pendapatan oleh pemerintah daerah. Sementara itu, Sari & Mustanda (2019) menyatakan bahwa belanja daerah (APBD) adalah rencana anggaran tahunan yang mencerminkan pelaksanaan desentralisasi fiskal, dengan pemungutan penerimaan daerah berfokus pencapaian target yang sudah ditetapkan dalam anggaran Belanja daerah. Namun, realisasi belanja daerah tidak selalu berdampak positif terhadap kinerja keuangan. Penelitian Safitri, Dirgantari, Hariyanto, & Winarni (2022) menunjukkan bahwa pada tahun anggaran 2019–2020, rata-rata alokasi belanja di kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah hanya mencapai 11,38% dari target awal. Meskipun terjadi penurunan alokasi belanja, analisis menunjukkan bahwa penurunan tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Sebaliknya, penelitian oleh Rusmita (2019) dan Dasmar dkk (2020) menemukan bahwa realisasi pengeluaran yang melampaui batas anggaran belanja berdampak kurang baik pada kinerja keuangan

pemerintahan, karena menunjukkan ketidakefisienan dalam pengelolaan anggaran. Penting bagi pemerintah daerah untuk tidak sebatas fokus pada anggaran yang dialokasikan, juga pada efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaannya guna menjamin bahwa belanja daerah sepenuhnya mendukung peningkatan kinerja keuangan serta pelayanan publik.

Ukuran sebuah pemerintah daerah menjadi faktor penting menentukan kinerja keuangan daerah. Namun pengaruhnya tidak selalu konsisten. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah, yang sering dinilai berdasarkan akumulasi aset, dapat berdampak positif maupun negatif terhadap kinerja keuangan. Menurut Maulina, Alkamal & Fahira (2021), Ukuran dari suatu pemerintahan daerah mencerminkan besarnya atau kecilnya suatu pemerintah daerah, dengan total aset sebagai basis pengukuran. Penelitian Putri & Amanah (2020) menambahkan bahwa ukuran pemerintah daerah yang mana lebih besar berpotensi mendorong peningkatan (PAD) melalui perantara, karena pemerintah mampu mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya di daerahnya melalui kegiatan operasional. Namun, penelitian lain menunjukkan hasil yang berbeda. Peneliti Wijayanti dan Suryandari (2020) mengindikasikan bahwa skala pemerintah daerah, cenderung memberikan dampak negatif terhadap capaian keuangan daerah tersebut. Salah satu penyebab utamanya adalah tingginya kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan atau praktik korupsi di daerah yang memiliki aset besar, yang pada akhirnya memperburuk kondisi keuangan. Variasi dalam hasil penelitian ini mengisyaratkan bahwa faktor-faktor seperti sistem tata kelola yang baik, keterbukaan informasi, serta pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran berperan penting dalam memperkuat hubungan antara ukuran daerah dan kinerjanya. Dengan demikian, penguatan aspek-aspek tersebut menjadi krusial bagi pemerintah daerah untuk tidak hanya fokus pada peningkatan ukuran atau aset, tetapi juga pada peningkatan kualitas untuk mencapai hasil kinerja keuangan yang optimal.

Menurut studi terdahulu, terdapat sejumlah faktor berdampak terhadap kinerja keuangan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Faktor-faktor tersebut memuat efektivitas PAD, efisiensi pengelolaan, antara anggaran operasional dan anggaran modal. Sebagai contoh, studi oleh Rohayatul Akyani (2024) menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah pada masa 2018–2022 mengalami

fluktuasi yang dipengaruhi oleh efektivitas PAD dan efisiensi keuangan daerah. Selain itu, penelitian oleh Hidayah, Imtikhanah & Habibi (2021) menemukan ada perbedaan yang nyata dalam aspek keuangan pemerintahan daerah periode pra-pandemi hingga masa berlangsungnya pandemi COVID-19 khususnya dalam hal Tingkat efektivitas keuangan dan distribusi Belanja untuk asset tetap. Dengan mempertimbangkan temuan-temuan tersebut, penelitian ini memutuskan untuk fokus pada analisis kinerja keuangan di 29 kabupaten serta 6 kota di Provinsi Jawa Tengah. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengalokasikan anggaran secara lebih efektif serta efisien guna memperbaiki kinerja keuangan pemerintah daerah, serta membantu terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang berkualitas di Provinsi Jawa Tengah.

Analisis perbedaan dengan studi dilakukan Safitri dkk (2022) terletak pada rentang waktu penelitian, populasi yang diteliti, serta variabel. Dalam penelitian berfokus pada pengaruh variabel PAD, investasi belanja daerah, besar kecilnya entitas pemerintah, serta fluktuasi anggaran kepada efektivitas keuangan daerah di wilayah Provinsi Jawa Tengah selama periode 2019 sampai 2021. Studi tersebut menggunakan sampel kabupaten serta kota di Provinsi Jawa Tengah. Sementara itu, studi ini memperluas cakupan waktu hingga tahun 2023 dan melibatkan seluruh 29 kabupaten dan 6 kota yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah, dengan total sebanyak 35 entitas pemerintah daerah yang dianalisis. Sumber data dalam studi ini berasal dari data sekunder yang diambil dari laporan resmi BPK, institusi negara yang berperan dalam melakukan pemeriksaan atas keuangan negara khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh variabel akuntabilitas daerah, belanja daerah, serta ukuran pemerintahan daerah mengenai kinerja keuangan daerah di Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian, diharapkan memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Menurut L Donaldson & Davis (1991) teori *stewardship*, digunakan untuk principal (masyarakat) terhadap pihak *steward* (pemerintah) yang cenderung melakukan pelayanan yang maksimal untuk masyarakat dibandingkan mengutamakan tujuan pribadi Pemerintah daerah menjadi *steward* memiliki kewajiban untuk menyediakan data yang bermanfaat untuk pemakai data keuangan pemerintah daerah. Teori

stewardship menggambarkan pemimpin sebagai individu yang tidak terdorong oleh kepentingan pribadi, melainkan oleh pencapaian tujuan utama organisasi. Menurut teori ini, manajemen berfokus pada menciptakan kepuasan kerja sebagai upaya untuk mencapai keberhasilan maksimal bagi organisasi. Supadmi & Suputra (2018). Dalam konteks penelitian pemerintah berperan sebagai penyedia layanan bagi masyarakat dalam pelaksanaan akuntabilitas daerah, belanja daerah, ukuran pemerintah daerah sebagai *agen/steward* harus bertanggung jawabkan atau menyelesaikan kegiatan operasional dan menyelaraskan tujuan pemerintah dengan masyarakat. Penelitian Yusuf, Ali, & Bouti (2021) menyatakan akuntabilitas pemerintahan merupakan kewajiban pemerintahan untuk mengungkapkan, menyampaikan dan memberikan pertanggungjawaban sebagai pihak pemberi amanah dan pertanggungjawaban.

Kinerja keuangan pemerintah daerah mencerminkan adanya hubungan *stewardship* terdapat pemerintah sebagai pelaksana tugas publik dan masyarakat sebagai pihak yang mempercayakan kewenangan. Dalam konteks ini, masyarakat memiliki hak untuk mengevaluasi kinerja pemerintah, terutama dalam pengelolaan keuangan. Teori *stewardship* berasumsi bahwa pejabat publik (*agen*) akan bertindak kepentingan terbaik masyarakat (*prinsipal*), karena keberhasilan organisasi sangat bergantung pada keselarasan L Donaldson & Davis (1991). Hubungan ini sejalan dengan variabel yang digunakan dalam penelitian, seperti akuntabilitas daerah, belanja daerah, serta ukuran pemerintahan daerah. Ketiga variabel tersebut mencerminkan bagaimana prinsip *stewardship* diimplementasikan dalam praktik pengelolaan keuangan sektor publik. Menurut Cribb (2006) teori *stewardship* juga berfungsi sebagai mekanisme akuntabilitas untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dicapai secara maksimal. Sebagaimana Mardiasmo (2002) bahwa pencapaian kesuksesan dalam organisasi pemerintahan bisa diwujudkan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan manajemen publik yang baik. Dengan demikian, teori *stewardship* dapat dijadikan landasan dalam penelitian sektor publik, termasuk dalam analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Ulya (2024). Berdasarkan asumsi yang ada, hipotesis berikut akan diuji secara empiris:

Hipotesis

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Mengacu instruksi presiden nomor 7 (1999) terkait akuntabilitas kinerja, instansi

pemerintah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pencapaian misi organisasi beserta arah kebijakan yang telah ditetapkan, dengan menggunakan laporan pertanggungjawaban secara berkala. Tujuan utama dari akuntabilitas ini adalah memastikan bahwa penggunaan anggaran daerah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui penyajian informasi keuangan yang valid dan dipercaya. LKPD merupakan alat penting terkait pelaksanaan tanggung jawab oleh otoritas daerah atas penggunaan anggaran dan penerimaan daerah. Dalam konteks ini, akuntabilitas daerah terbukti memberikan pengaruh positif mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah. Sesuai dengan teori *stewardship*, yang menekankan pentingnya keselarasan tujuan pengelola sebagai pihak yang dilayani. Akuntabilitas memastikan pelaksanaan program serta kegiatan pemerintah dapat tercapai tujuan yang telah direncanakan Vikrama (2017). Penelitian sebelumnya juga mengindikasikan bahwa tanggung jawab pemerintahan daerah berkontribusi dalam peningkatan kinerja keuangan daerah. Menurut Edowati dkk (2021) dengan penelitian Jeriansyah & Mappanyukki (2020) menyatakan akuntabilitas pemerintahan daerah berdampak positif bagi kinerja keuangan daerah. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis pertama yang diajukan sebagai berikut:

H1 = Akuntabilitas Pemerintahan Daerah Berpengaruh Positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan Pemdagri nomor 77 (2021), tentang pengelolaan pengeluaran pemerintah daerah atau belanja daerah yaitu aktivitas finansial yang mengurangi selisih asrt dan kewajiban selama satu periode. Penggunaan anggaran ini diutamakan untuk membiayai kewajiban pemerintah, terutama dalam penyediaan landasan pelayanan terhadap masyarakat yang sudah sesuai (SPM) seperti telah ditetapkan. Mengacu pada aturan pemerintah nomor 12 Tahun (2021), belanja daerah terbagi empat kategori : belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, serta belanja transfer. Dalam pengelolaannya, pemerintah berperan sebagai pihak yang bertanggung jawab (steward) untuk mengawasi dana publik secara optimal dan berorientasi pada kemakmuran masyarakat. Konsep ini selaras dengan teori *stewardship* yang menekankan tanggung jawab agen (pemerintah) untuk mencapai tujuan organisasi secara optimal. Perencanaan

belanja yang baik diharapkan mampu meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Studi Tedi (2023) mengungkapkan belanja daerah yang diarahkan secara tepat dapat mendorong peningkatan kinerja lembaga pemerintah. Hasil serupa juga ditemukan oleh beberapa peneliti lainnya yang mengungkapkan belanja daerah berpengaruh positif mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah Warna, Hamzani, & Rusmita (2024), B. I. Sari (2021), Selviana, Solehudin, & Nurhasanah (2023) dan Utari, Maksum, & Situmeang (2022). Selain itu, penelitian oleh Bilqis & Priyono (2023) menyatakan pengaruh belanja daerah mengenai kinerja keuangan daerah bersifat signifikan, mengelola belanja yang efisien. Berdasarkan uraian maka hipotesis kedua yang diajukan sebagai berikut :

H2 = Belanja Daerah berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Pengaruh Ukuran Pemerintahan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Penerapan ukuran pemerintahan daerah adalah salah satu upaya strategis meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Secara teoritis *stewardship*, ukuran pemerintah daerah yang umumnya diukur melalui seluruh nilai aset yang tercatat mencerminkan kapasitas dan sumber daya yang tersedia untuk menunjang kegiatan operasional pemerintahan akan semakin lancar seiring dengan bertambah besarnya ukuran pemerintah daerah, yang meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan secara efektif dan efisien. Ukuran pemerintah daerah juga berperan penting dalam meningkatkan potensi realisasi (PAD), pada akhirnya berdampak positif terhadap peningkatan kinerja keuangan daerah secara keseluruhan. Dengan pengelolaan aset dan sumber daya yang optimal, pemerintah daerah diharapkan mampu mencapai hasil kinerja yang lebih baik. Sejumlah penelitian mendukung pandangan ini, di antaranya adalah penelitian Kusumaningtyas & Rahmayati (2023), Rusmita (2019), Banunaek dkk (2022) dan Widya Safitri dkk (2023), menyimpulkan bahwasannya ukuran pemerintah daerah memiliki pengaruh positif mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis ketiga yang diajukan sebagai berikut:

H3 = Ukuran Pemerintahan Daerah berpengaruh Positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara kerja yang dapat digunakan untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan metode penelitian dapat diartikan sebagai tata cara kerja di dalam proses penelitian, baik dalam pencarian data ataupun pengungkapan fenomena yang ada (Zulkarnaen, W., et al., 2020:229). Penelitian menerapkan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder. Data yang digunakan berasal dari (LKPD) Provinsi Jawa Tengah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Data tersebut merupakan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas LKPD selama lima tahun, yaitu dari tahun 2019 hingga 2023. Penelitian ini mencakup seluruh pemerintah daerah pada Provinsi Jawa Tengah, yaitu 29 kabupaten serta 6 kota, sehingga total terdapat 35 entitas pemerintah daerah yang dianalisis. Seluruh populasi dijadikan teknik sampling jenuh dipilih karena seluruh populasi diikutsertakan sebagai sampel. Adapun data populasi diterapkan dalam studi ini mencakup seluruh laporan keuangan tahunan dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang mana dipublikasikan secara resmi dari (BPK) perwakilan provinsi Jawa Tengah.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan daerah melalui pengelolaan keuangan daerah mencakup serangkaian proses seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Kinerja ini menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana daerah mampu menjalankan otonomi daerahnya. Pendapatan transfer adalah salah satu sumber pembiayaan dalam pengelolaan keuangan daerah dengan pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk menjalankan program dan layanan publik. Semakin besar pendapatan transfer yang diterima, semakin kuat kemampuan fiskal daerah dalam menutupi belanja daerah, yang berarti kinerja keuangan bisa meningkat. Kinerja pengelolaan keuangan daerah mampu dievaluasi menggunakan penilaian rasio keuangan diperoleh berdasarkan data dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Rasio-rasio yang diterapkan meliputi efektivitas, efisiensi, kemandirian, keserasian, serta pertumbuhan pendapatan. Sanga & Yulia (2023), pengukuran kinerja keuangan daerah digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{PAD}{Pendapatan Transfer} \times 100\%$$

Keterangan :

PAD : Pendapatan asli daerah

Akuntabilitas daerah

Akuntabilitas daerah merupakan bentuk kewajiban dari pemerintah daerah sebagai penyelenggara kegiatan publik untuk memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban atas setiap keputusan, tindakan, serta hasil kinerja yang dicapai. Semakin baik penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, maka hal ini turut meningkatkan kinerja keseluruhan pemerintah daerah. Ini sejalan melalui peraturan pemerintah nomor 7 (1999) tentang akuntabilitas kinerja pemerintah, pentingnya pertanggungjawaban atas keberhasilan pelaksanaan misi organisasi, melalui pelaporan kinerja secara Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran yang sudah ditetapkan. Untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah telah menjalankan prinsip akuntabilitas, dapat digunakan pendekatan berbasis tingkat pengungkapan laporan keuangan. Dalam banyak penelitian, pengukuran tingkat akuntabilitas dilakukan dengan menilai tingkat pengungkapan informasi wajib dalam laporan keuangan daerah (LKPD) menurut ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor 71 (2015) mengenai dtandart akuntabsi pemerintahan (SAP), terdapat 34 item pengungkapan wajib yang harus disajikan dalam LKPD. Semakin lengkap pengungkapan informasi tersebut, maka semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas yang tercermin dalam pengelolaan keuangan daerah. Satyaningrum & Syafitri (2012), untuk mengukur akuntabilitas daerah digunakan rumus sebagai berikut :

Akuntabilitas Daerah = $\sum$ item pengungkapan wajib berdasarkan SAP

Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berfungsi sebagai tulang punggung anggaran yang digunakan untuk mendukung perencanaan organisasi, pengalokasian sumber daya publik, serta pemantauan dan evaluasi kinerja pemerintah. Sesuai dengan permendagri nomor 15 (2023) dan permendagri nomor 77 (2020), dalam pengelolaan keuangan daerah, pengeluaran pemerintah daerah terbagi menjadi empat kategori utama, yakni belanja operasional, belanja untuk investasi aset (belanja modal), belanja tak terduga, serta belanja transfer. Masing-masing jenis belanja ini memiliki peran yang spesifik dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah secara efektif dan efisien. Dewi & Lestari (2019), untuk mengukur Belanja daerah digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Belanja Daerah} = \text{TBO} + \text{TBM} + \text{TBTD} + \text{TBF}$$

Keterangan :

- TBO : Total belanja operasi
- TBM : Total belanja modal
- TBTD : Total belanja tidak terduga
- TBF : Total belanja transfer

Ukuran Pemerintahan Daerah

Ukuran pemerintah daerah yang diukur dari jumlah aset keseluruhan menjadi salah satu indikator penting untuk menilai pelaksanaan aktivitas operasional pemerintahan. Semakin besar skala pemerintah daerah, maka mudah pula dalam menjalankan fungsi-fungsi operasional dan administrasi pemerintahan. Besarnya ukuran tersebut juga mempermudah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan realisasi pendapatan serta mendorong perbaikan kinerja keuangan pemerintah daerah. Sari & Mustanda (2019), untuk mengukur ukuran pemerintahan daerah digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Ukuran Pemerintahan Daerah} = \text{Total Asset} \times 100\%$$

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Statistik Deskriptif

Tabel 2 menyajikan statistik deskriptif terkait variabel akuntabilitas daerah, belanja daerah, serta ukuran pemerintahan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dari tabel tersebut, terlihat bahwa data yang terdistribusi secara normal ditandai dengan nilai rata-rata (mean) yang lebih besar dibandingkan dengan standar deviasi. Dalam tabel ini variabel akuntabilitas daerah, belanja daerah, ukuran pemerintahan daerah, serta kinerja keuangan daerah semuanya mempunyai nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi ($\text{Mean} > \text{Std. Dev}$) menunjukkan bahwa data pada studi terdistribusi secara normal, sehingga analisis dapat dilaksanakan uji selanjutnya.

Model Pengukuran (*Outer Model*)

Berikut ini merupakan pengujian yang dilakukan terhadap outer model:

Convergent Validity

Convergent validity merupakan ukuran hubungan antara suatu konstruk dengan indikator-indikator yang memiliki keterkaitan tinggi. Nilai *Convergent validity* diukur berdasarkan loading factor pada variabel laten melalui nilai $\text{validity} > 0.7$ akan menghasilkan nilai yang ideal dan indikator dinyatakan valid Hair, Ringle, & Sarstedt (2013), gambar dibawah menunjukan bahwa semua indikator variabel tersebut

mempunyai nilai korelasi di atas atau lebih 0,7 mengungkapkan bahwa seluruh indikator tersebut valid dan dapat digunakan

Model Struktural (Inner Model)

Berikut ini yaitu hasil pengujian terhadap inner model:

R-Square (R^2)

Mengacu pada Chin (1998) nilai R^2 digunakan untuk mengukur tingkat akurasi prediksi dalam model struktural. Konstruk endogen, yaitu kinerja keuangan pemerintahan daerah, memiliki nilai R^2 sebesar 0,782 seperti yang terlihat pada Tabel 3. Juliandi (2018) menyatakan bahwa nilai R-Square dibagi tiga kategori, yaitu 0,75, 0,50, serta 0,25, yang masing-masing menjelaskan pengaruh yang kuat, sedang, dan lemah dalam sebuah model. Tabel 3, menyajikan nilai R-Square untuk kinerja keuangan pemerintahan daerah adalah sebesar 0,782, yang berarti angka tersebut menunjukkan 78,2% sebanyak 21,8% lagi dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak mencakup dalam variabel yang diteliti. Oleh karena itu, nilai R-Square Adjusted yang lebih besar dari 0,75 mengungkapkan R-Square Adjusted ini termasuk dalam kategori pengaruh Karena lebih dari 0,75.

F-Square (F^2).

Nilai F Square (F^2) menggambarkan besarnya dampak variabel laten eksogen pada variabel laten endogen dapat dinilai menggunakan nilai F^2 . Chin (1998), menyatakan bahwa nilai F^2 yang melebihi 0,02 namun masih di bawah 0,15 dikategorikan sebagai pengaruh kecil. Jika nilainya berada antara 0,15 dan 0,35, maka pengaruhnya dianggap sedang atau moderat, sementara nilai yang lebih dari 0,35 menunjukkan adanya pengaruh yang kuat atau besar.

Dari tabel F-Square, diperoleh nilai 2,097 mengungkapkan akuntabilitas daerah mempunyai pengaruh yang rendah terhadap kinerja keuangan pemerintahan daerah. Sedangkan variabel penggunaan belanja daerah (APBD) dengan nilai 0,065 menggambarkan adanya pengaruh kecil mengenai kinerja keuangan pemerintahan daerah. Ukuran pemerintahan daerah juga menunjukkan nilai 0,006 yang berarti pengaruhnya terhadap kinerja keuangan pemerintahan daerah termasuk kecil.

Hasil pada Tabel 5 dari uji *path coefficient* menyatakan bahwa akuntabilitas daerah, belanja daerah, dan besarnya suatu pemerintah daerah dapat memengaruhi

kinerja keuangan pemerintahan daerah, tetapi secara statistik, pengaruh tersebut tidak signifikan.

Hasil Pengujian Hipotesis Pertama

Pengujian hipotesis pertama (H1) ditolak, dengan analisis memperlihatkan P sebesar 0.108 jauh di atas 0,05 dan nilai t sebesar 1.609. Hasil ini disebabkan akuntabilitas daerah mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahun, perubahan tersebut tidak cukup konsisten dan efektif untuk memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Mengungkapkan bahwa penerapan akuntabilitas belum berjalan secara optimal, karena masih bersifat formalitas dan belum digunakan secara maksimal dalam pengambilan keputusan serta pengelolaan keuangan daerah. Akibatnya, akuntabilitas tidak memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja keuangan.

Berdasarkan teori stewardship, penting untuk menyelaraskan tujuan, dimana dalam konteks ini tujuan yang ingin diraih adalah akuntabilitas kinerja pemerintah daerah guna mengukur sejauh mana akuntabilitas bekerja secara pertanggungjawaban yang baik. Namun, jika akuntabilitas daerah mengalami kenaikan dan penurunan maka dapat menyebabkan dampak akuntabilitas daerah tidak signifikan. Maka dari itu akuntabilitas daerah terhadap kinerja keuangan tidak mencapai dengan tujuan dan misinya terhadap kinerja keuangan daerah.

Menurut Jitmau dkk (2017) menunjukkan hasil dari akuntabilitas tidak berdampak pada hasil kinerja pemerintahan daerah. Akuntabilitas dinilai tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah karena pemerintah dianggap kurang berhasil dalam melaksanakan misi demi pencapaian tujuan dan sasaran yang dijadwalkan secara berkala, temuan ini sejalan dengan hasil riset yang telah dilakukan sebelumnya. Setyawan & Erryana (2016) dan Binawati & Badriyah (2022) akuntabilitas tidak mempengaruhi kinerja pemerintah daerah disebabkan karena kurangnya pengawasan dan tindakan, tetapi akuntabilitas daerah tetap Fungsinya adalah menyampaikan data, melaporkan, dan membahas bentuk kegiatan berhubungan dengan penggunaan daya yang dimiliki oleh Masyarakat.

Hasil Pengujian Hipotesis Kedua

Pengujian hipotesis kedua (H2) ditolak. dengan memperlihatkan P sebesar 0.704 melebihi 0,05 dan nilai t sebesar 0.379. Hasil ini menunjukkan beberapa faktor memengaruhi belanja daerah dalam penggunaan anggaran, seperti perbedaan prioritas

antar daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing wilayah. Selain itu, keterbatasan kapasitas dalam perencanaan dan penganggaran juga menjadi kendala, karena tidak semua daerah memiliki sumber daya manusia yang cukup terampil menyusun anggaran secara efektif. Dalam efektivitas pelaksanaan program kerja turut memengaruhi hasil penggunaan anggaran, karena manajemen dan pengawasan di tiap daerah berbeda-beda. Selain itu, tidak semua jenis belanja berdampak langsung pada indikator kinerja keuangan, karena sebagian besar anggaran dialokasikan untuk belanja wajib atau operasional rutin, seperti gaji pegawai dan administrasi, yang penting untuk kelangsungan pemerintahan tetapi tidak meningkatkan aset atau pendapatan daerah secara langsung.

Berdasarkan teori *stewardship* dalam peranannya sebagai pengawas atau pengelola, principal (masyarakat). Perencanaan kinerja secara efektif diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintahan. Namun, peningkatan belanja daerah yang signifikan justru dapat berdampak negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Menurut Saputri & Kurnia (2020) menunjukkan bahwa belanja daerah tidak berdampak mempengaruhi kinerja keuangan daerah karena alokasi belanja rutin (langsung) lebih dominan dibandingkan dengan pengeluaran untuk belanja modal dan infrastruktur (tidak langsung). Padahal, belanja modal merupakan jenis pengeluaran yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, misalnya melalui pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun, jika belanja modal melebihi belanja rutin atau operasional, hal ini dapat menyebabkan penurunan kinerja keuangan daerah. Kondisi ini terjadi karena belanja modal biasanya membutuhkan biaya besar dan tidak langsung menghasilkan pendapatan bagi daerah. Selain itu, peneliti Dasmar dkk (2020) dan Amanda (2023) realisasi belanja daerah yang melebihi anggaran justru tidak meningkatkan kinerja keuangan karena beban biaya yang tidak seimbang dengan pendapatan daerah.

Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga

Pengujian Hipotesis Ketiga (H3) ditolak. analisis memperlihatkan $P = 0,902$ dan nilai t sebesar 0.123 . Hal ini bisa terjadi karena ukuran pemerintahan daerah yang besar tidak selalu diimbangi dengan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan. Misalnya, daerah yang lebih besar mungkin menghadapi permasalahan seperti korupsi yang justru

menghambat kinerja keuangan. Selain itu, kinerja keuangan daerah juga sangat dipengaruhi oleh faktor manajerial, transparansi, dan kualitas perencanaan anggaran yang tidak hanya tergantung pada ukuran pemerintahan. Oleh karena itu, ukuran pemerintahan tidak efektif dalam kinerja keuangan daerah.

Berdasarkan teori *stewardship*, ukuran pemerintahan daerah terhadap kinerja keuangan yang baik dengan melihat Jumlah total aset daerah menjadi salah satu ukuran dalam menilai kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional pemerintahan daerah. Dengan demikian, peningkatan jumlah asset yang di miliki oleh pemerintahan daerah akan berdampak pada peningkatan kemudahan yang dimiliki dalam menjalankan aktivitas operasionalnya.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya peneliti Wijayati & Suryandari (2020) menyatakan ukuran Pemerintahan daerah berpengaruh negatif dikarenakan ukuran pemerintahan daerah memiliki aset dalam jumlah besar akan diikuti pula dengan resiko penyalagunaan atau korupsi yang besar sehingga mempengaruhi kinerja keuangan daerah. serta Mulyani dan Wibowo (2017) dan Nugroho dan Prasetyo (2018), menyatakan bahwa ukuran pemerintahan daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah.

KESIMPULAN

Analisis yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah yang berada di wiliayah Provinsi Jawa Tengah selama periode 2019–2023, ditemukan bahwa variabel akuntabilitas daerah, belanja daerah, dan ukuran pemerintahan daerah belum memberikan pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap kinerja keuangan daerah. Temuan ini, meyampaikan pelaksanaannya mungkin belum berjalan secara optimal sehingga belum memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja keuangan. Namun lebih mencerminkan implementasi dan pengelolaannya belum berjalan secara maksimal, sehingga belum menyajikan dampak nyata atas peningkatan hasil keuangan. Studi ini memiliki sejumlah keterbatasan, termasuk ruang lingkup variabel yang masih terbatas, penggunaan data sekunder yang belum mampu menangkap aspek manajerial atau faktor lainnya, serta kemungkinan adanya pengaruh eksternal yang tidak dianalisis secara khusus. Dengan demikian, temuan dari peneliti diharapkan dapat memberikan manfaat referensi pemerintah daerah maupun peneliti selanjutnya untuk memperluas cakupan variabel, mempertimbangkan pendekatan yang lebih menyeluruh, serta

mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

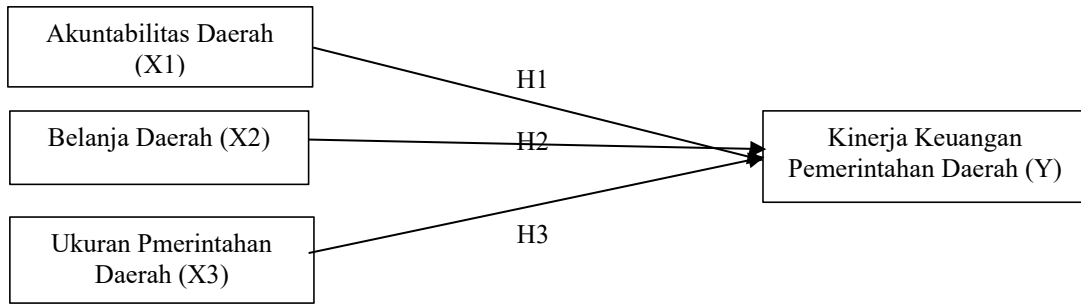
- Akyani, R. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018-2022 Melalui Pendekatan Value for Money. uin kh abdurrahman wahid pekalongan
- Amanda, C. D. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12(2), 189–200.
- Anugerah, M. (2024). Pengaruh pad, dana perimbangan dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi = the effect of local revenue, revenue funds and local expenditures on local government financial performance. universitas hasanuddin..
- Banunaek, I. A., Manafe, H. A., & Perseveranda, M. E. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, dan Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah). *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 4(1), 49–59.
- Bilqis, H. K., & Priyono, N. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2015-2020. *Jurnal Economina*, 2(2), 612–621.
- Binawati, E., & Badriyah, N. (2022). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Magelang. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 2(1), 32–49. <https://doi.org/10.32477/jrabi.v2i1.419>
- Chin, W. W. (1998). The partial least squares approach to structural equation modelling. In Marcoulides G. A. (Ed.). *Modern Methods for Business Research*, 295(2), 295–336.
- Cribb, J. (2006). Agents or Stewards ? Contracting with. *Policy Quarterly*, 2(2), 11–17.
- Dasmar, T., Basri, Y. M., & Indrawati, N. (2020). Pengaruh Kekayaan Daerah, Belanja Daerah, Intergovernmental Revenue, Temuan Audit (BPK) Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Riau). *Jurnal Al-Iqtishad*, 16(2), 39–57.
- Dewi, D., & Lestari, I. (2019). Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Rangka Pelaksanaan Otonomi Derah Di Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan. 4.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns (June 1991), 49–65.
- Edowati, M., Abubakar, H., & Said, M. (2021). Analysis of Accountability and Transparency in Regional Financial Management on the Performance of the Regional Government of Deiyai Regency. *Indonesian Journal Of Business And Management*, 4(1), 87–96.
- Firmanto, F. U.-U. N. 32 T. 2004 T. P. D. . J. P. 2. . (2019): 24-28. (2004). “Peranan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.” *Jurnal Pahlawan 2.1* (2019): 24-28. *Demographic Research*, 4–7.
- Hair, J. F., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2013). Partial Least Squares Structural Equation Modeling: Rigorous Applications, Better Results and Higher Acceptance. *Long Range Planning*, 46(1–2), 1–12. <https://doi.org/10.1016/j.lrp.2013.01.001>

- Halim, C., Savitri, E., & Diyanto, V. (2016). Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Dan Market Effect Untuk Memprediksi Kebangkrutan Bank Menggunakan Model Regresi Logistik (Studi Pada Bank Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012). Riau University.
- Hidayah, R., Intikhanah, S., & Habibi, K. A. (2021). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah se-provinsi jawa tengah sebelum dan saat pandemi covid-19: dibuat oleh kurnia ahsanul habibi, sobrotul intikhanah, rini hidayah (dosen dan mahasiswa feb universitas muhammadiyah pekajangan pekalongan). neraca, 17(1), 122–147.Indonesia, R. (1999). Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Bagian Proyek Peningkatan Publikasi Pemerintah, Direktorat Publikasi, Ditjen
- Jeriansyah, W., & Mappanyukki, R. (2020). The Effect of Accountability and Transparency of Regional Financial Management on Local Government Performance. *International Journal of Asian Social Science*, 10(12), 721–729. <https://doi.org/10.18488/journal.1.2020.1012.721.729>
- Jitmau, F., Kalangi, L., & Lambey, L. (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Di Kabupaten Sorong). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(1), 276–285. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.16036>
- Juliandi, A. (2018). Structural Equation Model Partial Least Square (SEM-PLS) Menggunakan SmartPLS. *Jangan Belajar*, 1(was), 1–4.
- KUSUMANINGTYAS, L., & Rahmayati, A. (2023). Pengaruh ukuran pemerintah daerah, belanja daerah, tingkat ketergantungan, tingkat kemakmuran, dan leverage terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi jawa tengah tahun 2019–2021. *uin raden mas said*.
- Mardiasmo. (2002). Elaborasi Reformasi Akuntansi Sektor Publik: Telaah Kritis Terhadap Upaya Aktualisasi Kebutuhan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. *Journal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 6(1), 63–82.
- Maulina, A., Alkamal, M., & Fahira, N. S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *JISAMAR (Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research)*, 5(2), 390–399.
- Mulyani, S., & Wibowo, H. (2017). Pengaruh belanja modal, ukuran pemerintah daerah, intergovernmental revenue dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan (kabupaten/kota di provinsi jawa tengah, tahun 2012-2015). *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 15(1).
- No. 71 (2010). (2015). 2010. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 44–62. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v2i1.4>
- Nugroho, T. R., & Prasetyo, N. E. (2018). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Jawa Timur. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 7(1), 27–34.
- Olin, M. V. L., Herdi, H., & Goo, E. E. K. (2024). Analisis faktor pemicu terjadinya selisih anggaran dengan realisasi pendapatan, laba dan biaya pada perusahaan daerah air minum (pdam) wair pu'an kabupaten sikka. *jurnal accounting unipa*, 3(1), 369–386.
- Onibala, A., Rotinsulu, T. O., & Rorong, I. P. F. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 22(2), 67–89.

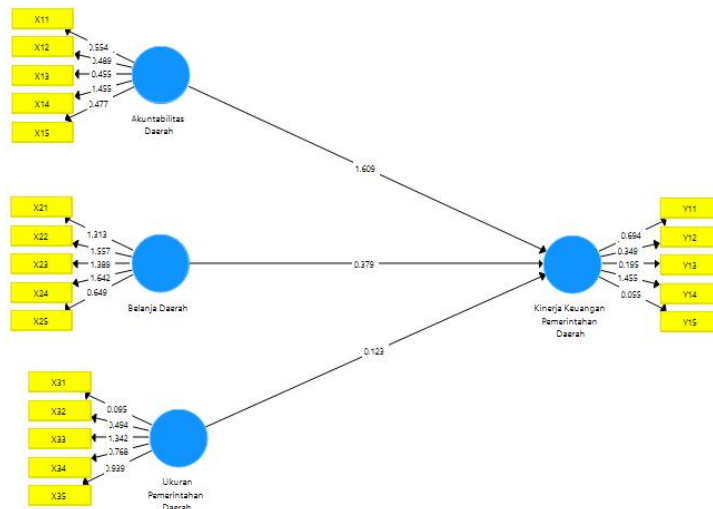
- PEMERINTAH, I. I. P. N. 7 T. 1999 T. A. K. I. (2007). Mplementasi instruksi presiden nomor: 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi. permendagri no.12 2019. (2021). 1), 44–54. <https://doi.org/10.51622/vsh.v2i1.334>
- Permendagri, P. P. N. (2023). Permendagri No 77 Tahun 2020. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum), 6(2), 1223–1230.
- Purwanti, E., & Noviyanti, E. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2014-2018. Among Makarti, 14(2).
- Putri, R. A. R., & Amanah, L. (2020). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA), 9(8).
- Runtuwene, S. K., & Gamaliel, H. (2019). Evaluasi Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Dana Dekonsentrasi. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 7(4).
- Rusmita, S. (2019). Effect of regional government characteristics of financial performance. International Research in Economics and Finance, 3(2), 29.
- Safitri, B. W., Dirgantari, N., Hariyanto, E., & Winarni, D. (2022). Pengaruh PAD, Belanja Modal, Ukuran Pemerintah, dan Perubahan Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2021). Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (EK Dan BI), 5(2), 401–409.
- Sains, F. S. (2018). Analisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah. The New Fraud Triangle Model Dengan Perspektif Syariah Dalam Mendeteksi Perilaku Fraud.” Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan), 4(1), 21–46.
- Sanga, K. P., & Yulia Jaeng, W. M. (2023). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur. Journal on Education, 5(2), 2721–2728. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.916>
- Saputri, S. H., & Kurnia. (2020). Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Daerah, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 9(1), 1–21.
- Sari, B. I. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 3(1), 1–11.
- Sari, N. M. D. P., & Mustanda, I. K. (2019a). Pengaruh ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Udayana University.
- Sari, N. M. D. P., & Mustanda, I. K. (2019b). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana, 8(8), 4759. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2019.v08.i08.p02>
- Selviana, J., Solehudin, S., & Nurhasanah, N. (2023). Peran Pendapatan Asli Daerah (Pad), Belanja Daerah Dan Dana Perimbangan Pada Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Karawang. Gorontalo Management Research, 6(2), 58. <https://doi.org/10.32662/gomares.v6i2.3052>
- Setyaningrum, D., & Syafitri, F. (2012). Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 9(2), 154–170. <https://doi.org/10.21002/jaki.2012.10>

- Setyawan, H., & Erryana, V. (2016). Determinan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 5(1), 1–14.
- Supadmi, N. L., & Suputra, D. G. D. (2018). Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan keuangan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa di kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi Dan Pariwisata*, 13(2).
- Tandi, A. Y. (2023). Implementasi Aksi Konvergensi Pada Program Stunting di Kabupaten Toraja Utara. Universitas Hasanuddin.
- Ulfah, I. F. (2018). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pada Panti Asuhan Al Maa'uun. Seminar Nasional Dan Call for Paper III Fakultas Ekonomi, 216–225.
- Ulya, I. (2024). Pengaruh pendapatan asli daerah (pad), dana perimbangan, belanja modal, ukuran pemerintah daerah, dan leverage terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2019–2021). universitas islam sultan agung semarang.
- Utari, U., Maksum, A., & Situmeang, C. (2022). the Effect of Pad, Balanced Funds, and Regional Expenditures on Financial Performance of Regional Governments in District/City North Sumatra Province 2017-2020. *International Journal of Economic, Business, Accounting, Agriculture Management and Sharia Administration (IJEBAAS)*, 2(1), 67–74. <https://doi.org/10.54443/ijebas.v2i1.172>
- Vikrama, A. A. (2017). Evaluasi Transparansi Dan Akuntabilitas Inventarisasi Bmd Pada Badan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Bangli. *Citizen Charter*, 2(2), 165235.
- Warna, W., Hamzani, U., & Rusmita, S. (2024). Accountability and Transparency of Village Fund Budget Management.
- Widya Safitri, B., Dirgantari, N., Hariyanto, E., & Winarni, D. (2023). The effect of pad, capital expenditures, government size, and budget changes on regional financial performance (in central java province in 2019-2021). *Ijafibs*, 10(4), 201–208. Retrieved from www.ijafibs.pelnus.ac.id
- Wijayanti, Y., & Suryandari, D. (2020). The Effect of Regional Characteristics, Leverage, Government Complexity, BPK Audit Findings and Opinions on Local Government Financial Performance. *Accounting Analysis Journal*, 9(1), 30–37. <https://doi.org/10.15294/aaj.v9i1.22483>
- Yusuf, F. M., Ali, Y., & Bouti, S. P. (2021). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Ombulo Tango Kecamatan Tolangohula. *JSAP: Journal Syariah and Accounting Public*, 4(2), 77–88.
- Zulkarnaen, W., Fitriani, I., & Yuningsih, N. (2020). Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di KPU Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 222-243. <https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss2.pp222-243>.

GAMBAR DAN TABEL



Gambar 1. Kerangka Konseptual



Gambar 2. Convergent Validity

Sumber: Hasil Olah Data SEM-PLS, diproses 2025

Tabel 1. Populasi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah

No.	Kabupaten/Kota	No.	Kabupaten/Kota	No.	Kabupaten/Kota
1.	Kab Banjarnegara	16.	Kab Magelang	31.	Kota Pekalongan
2.	Kab Banyumas	17.	Kab Pati	32.	Kota Salatiga
3.	Kab Batang	18.	Kab Pekalongan	33.	Kota Semarang
4.	Kab Blora	19.	Kab Pemasang	34.	Kota Surakarta
5.	Kab Boyolali	20.	Kab Purbalingga	35.	Kota Tegal
6.	Kab Brebes	21.	Kab Purworejo		
7.	Kab Cilacap	22.	Kab Rembang		
8.	Kab Demak	23.	Kab Semarang		
9.	Kab Grobogan	24.	Kab Sragen		
10.	Kab Jepara	25.	Kab Sukoharjo		
11.	Kab Karanganyar	26.	Kab Tegal		
12.	Kab Kebumen	27.	Kab Temanggung		
13.	Kab Kendal	28.	Kab Wonogiri		
14.	Kab Klaten	29.	Kab Wonosobo		
15.	Kab Kudus	30.	Kota Magelang		

Sumber Data : Provinsi Jawa Tengah

Tabel 2. Tabel Deskriptif

Indicator	Mean	Std. Deviation
Y11	249.829	0.241

Y12	8.111	38.960
Y13	6.231	34.265
Y14	0.337	0.368
Y15	9.594	54.333
X11	0.486	1.833
X12	0.629	1.835
X13	0.343	1.051
X14	0.629	1.000
X15	0.600	2.129
X21	29.406	2.334
X22	28.398	0.658
X23	28.453	0.645
X24	28.425	0.603
X25	28.463	1.983
X31	29.187	218.645
X32	29.205	126.241
X33	29.387	195.577
X34	29.276	131.949
X35	30.14	247.982

Sumber: Hasil Olah Data SEM-PLS, diproses 2025

Tabel 3. Hasil Penyesuaian R² dan R Square

	R Square	R Square Adjusted
Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah	0.782	0.761

Sumber: Hasil Olah Data SEM-PLS, diproses 2025

Tabel 4. Result of F²

	Kinerja Keuangan Pemerintahan
Akuntabilitas Daerah	2.097
Belanja Daerah	0.065
Kinerja Keuangan Pemerintahan	
Ukuran Pemerintahan Daerah	0.006

Sumber: Hasil Olah Data SEM-PLS, diproses 2025

Tabel 5. Path coefficient

	T Statistics (O/STDE)	P Values	Keterangan
Akuntabilitas Daerah -> Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah	1.609	0.108	H1 Ditolak
Belanja Daerah -> Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah	0.379	0.704	H2 Ditolak
Ukuran Pemerintahan Daerah -> Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah	0.123	0.902	H3 Ditolak

Sumber: Hasil Olah Data SEM-PLS, diproses 2025